

OPTIMALISASI KEWENANGAN GUBERNUR DALAM MELAKUKAN
PENGAWASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015

SKRIPSI



Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Disusun Oleh:

Nama : Diana Hijri Nursyahbani

NIM : 20140610497

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Tata Negara

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Diana Hijri Nursyahbani

NIM : 20140610497

Judul Skripsi : OPTIMALISASI KEWENANGAN
GUBERNUR DALAM MELAKUKAN
PENGAWASAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
137/PUU-XIII/2015

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana S-1 yang telah diperoleh karena karya tulis ini, dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 11 Maret 2018



Yang Menyatakan

Diana Hijri Nursyahbani
Diana Hijri Nursyahbani

NIM. 20140610497

HALAMAN MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Al Insyirah : 6)

Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya

(Imam Syafi'i)

Hiduplah untuk mewarnai bukan diwarnai, percaya dengan kapasitas dan karakter diri yang akan membuatmu diperhitungkan dimanapun kamu berada

(Bahauddin Toppo)

Libatkan Allah dalam menuntut ilmu, jika sudah bisa ada baiknya tetap rendah hati

(Siti Aisyah Sunusi)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penelitian ini saya dedikasikan kepada:

1. Allah SWT Yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih.
2. Ayah saya, Drs. Bahauddin Toppo M.Si
3. Ibu saya, Siti Aisyah Sunusi S.Pd
4. Kedua kakak saya, Nurwalidah S.KM dan Nurzakinah S.KM
5. Abang saya, Sarifudin S.Sos
6. Adzki Askana Sakhi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat Ilmu Pengetahuan.....	6
2. Manfaat Pembangunan.....	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 7

A. Tinjauan Umum Peraturan Daerah 7

B. Tinjauan Umum Pemerintah Daerah 10

C. Tinjauan Umum Kewenangan Gubernur..... 13

D. Tinjauan Umum Putusan Mahkamah Konstitusi..... 16

BAB III METODE PENELITIAN 20

A. Jenis Penelitian 20

B. Bahan Data 20

C. Teknik Pengumpulan Data 23

D. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian dan Lokasi Penelitian..... 24

E. Cara Pengolahan Data 24

F. Teknik Analisis Hasil Penelitian 25

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 26

A. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015
Terhadap Kewenangan Gubernur Dalam Melakukan Pengawasan Perda
Kabupaten/Kota..... 26

B. Optimalisasi Kewenangan Gubernur Dalam Mengawasi Perda

Kabupaten/Kota ditinjau dari Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU- XIII/2015	48
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	79

DAFTAR LAMPIRAN

1. Turnitin
2. Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Surat Keterangan Penelitian dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Istimewa
Yogyakarta
4. Data Raperda Kabupaten/Kota yang Bermasalah dari Biro Hukum Pemerintah Daerah
DIY
5. Daftar Pertanyaan Ahli
6. Risalah Sidang Perkara Nomor 137/PUU-XIII/2015
7. Ringkasan Permohonan Perkara Nomor 137/PUU-XIII/2015
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015